

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan tata ruang berdasarkan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan bagian dari proses penataan ruang. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang adalah adalah proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam (Mungkasa, 2020) perencanaan tata ruang (*spatial planning*) dirancang untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program lain yang mempengaruhi dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunannya. Produk dari kegiatan perencanaan tata ruang ini dapat berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTR Pulau/Kepulauan/RTRW Provinsi yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang (Sukamara dkk., 2021).

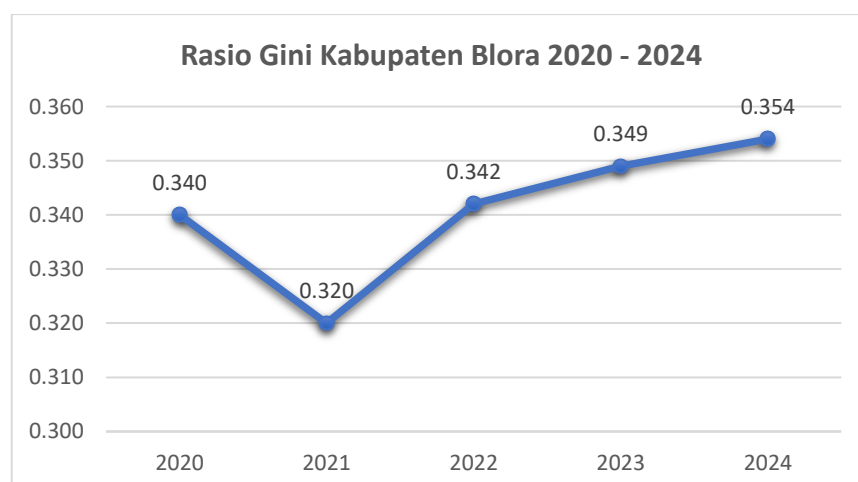
Proses optimalisasi suatu wilayah yang semakin cepat mendorong pemerintah daerah untuk membangun rencana pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan pendapatan antar-penduduk dan antar-sektor yang semakin kecil (Pratiwi & Kuncoro, 2016). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan berdasarkan kebijakan pemerintah seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan. Ketidakmerataan ini menimbulkan berbagai masalah dalam pembangunan serta menambah ketimpangan antar-wilayah yang menyebabkan permasalahan ekonomi yang kompleks.

Peningkatan populasi, ketersediaan barang modal, luas lahan, dan kualitas teknologi yang digunakan adalah beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Rohmah & Fitrianto, 2024). Pergerakan populasi dari satu wilayah ke wilayah lain dapat terjadi jika wilayah yang ditinggali mengalami kesulitan ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Penduduk cenderung mencari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudahan aksesibilitas dalam menjangkau wilayah lain memperlancar aliran barang dan modal serta mobilitas sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian (Rohmah & Fitrianto, 2024). Maka dari itu, dalam pertumbuhan wilayah selain adanya “pusat” juga harus memiliki “wilayah pengaruh” (wilayah pelayanan) (Adisasmita, 2010). Pengembangan wilayah di pusat-pusat pertumbuhan dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pembangunan wilayah di sekitarnya. Hal ini dikarenakan pusat pertumbuhan dapat menyebabkan *spread effect* (efek sebar) ke daerah sekitarnya, sehingga daerah di sekitarnya juga akan tumbuh dan berkembang (Emalia & Farida, 2018).

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 kontribusi PDRB Kabupaten Blora hanya sebesar 1,87% terhadap total PDRB Jawa Tengah. Perbedaan tingkat pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Blora yang dipengaruhi oleh potensi masing-masing kecamatan menghasilkan tingkat pendapatan yang berbeda beda. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan pada kepemilikan sumber daya. Terjadinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Blora ini dapat disebabkan karena perbedaan komposisi penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap kecamatannya.

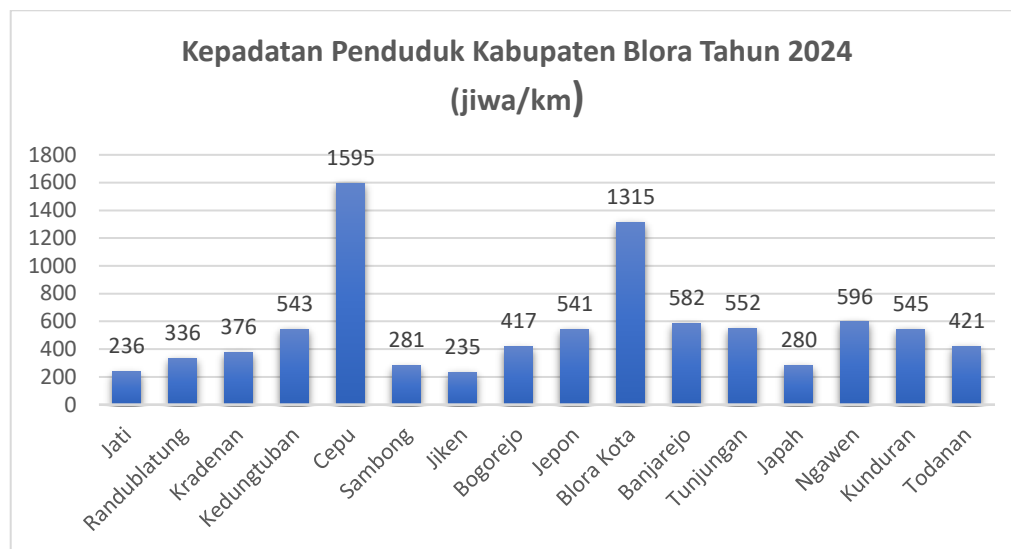
Salah satu faktor yang menentukan besarnya tingkat ketimpangan suatu wilayah adalah rasio gini. Rasio gini adalah sebuah alat ukur untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang tingkat pengembangan permukiman transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan. Nilai rasio gini terletak antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Kriteria ketimpangan berdasarkan rasio gini yakni 0 – 0,3 termasuk kriteria ringan, 0,3 – 0,5 termasuk kriteria sedang, dan lebih dari 0,5 termasuk kriteria berat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2024

Gambar 1. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2020-2024

Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Blora tahun 2020 – 2024 termasuk dalam kriteria ketimpangan yang sedang. Pada tahun 2020 nilai rasio gini tercatat sebesar 0,340 dan sempat mengalami penurunan menjadi 0,320 pada tahun 2021. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang menekan pendapatan hampir semua kelompok masyarakat sehingga distribusi pendapatan menjadi relatif lebih merata. Namun, sejak tahun 2022 ketimpangan kembali meningkat mejadi 0,342 dan terus naik sampai tahun 2024 hingga mencapai 0,354. Perbedaan pembangunan di Kabupaten Blora ini juga dipengaruhi oleh perbedaan luas wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seringkali menunjukkan infrastruktur dan ekonomi yang lebih maju dibandingkan wilayah dengan kepadatan rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2025

Gambar 1. 2 Grafik Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2024

Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Cepu menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi se Kabupaten Blora yakni sebesar 1.595 jiwa/km² disusul dengan Kecamatan Blora dengan kepadatan penduduk sebesar 1.315 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Jati dan Kecamatan Jiken yakni sebesar 236 jiwa/ km² dan 235 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kecamatan Cepu ini dapat dipicu karena Kecamatan Cepu termasuk wilayah yang strategis dan memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Selain tingkat kemiskinan, rasio gini, dan kepadatan penduduk, indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah adalah dilihat dari kondisi infrastruktur dan aksesibilitas pada tiap kecamatannya. Infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan tersedianya infrastruktur

yang baik dapat meningkatkan hasil produksi, membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iqbal dkk., 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2025

Gambar 1. 3 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Blora (Km), 2024

Kecamatan Blora Kota memiliki panjang jalan yang terpanjang dibanding kecamatan lain, baik yang kondisinya baik sekali yaitu 71,35 km maupun yang rusak berat yaitu 32,32 km. Kecamatan Randublatung, Kradenan, dan Jepon menunjukkan permasalahan serius karena meskipun memiliki jalan dalam kondisi baik, panjang jalan rusak berat juga relatif tinggi. Jalan dengan kondisi rusak berat di Kecamatan Kradenanan mencapai 35,83 km, Kecamatan Randublatung 30,85 km, dan Kecamatan Jepon 25,14 km. Kecamatan lain seperti Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong dan Kecamatan Banjarejo memiliki panjang jalan dengan kondisi rusak berat lebih besar dibanding jalan dengan kondisi baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas infrastruktur jalan antar kecamatan di Kabupaten Blora

Ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Blora ini terjadi karena keterkaitan antar wilayah sebagai suatu sistem belum terbentuk secara optimal. Konsep pusat pertumbuhan diterapkan guna mendukung perkembangan daerah-daerah yang tertinggal sehingga terjadi pemerataan atau peningkatan ekonomi di daerah tersebut (Ode dkk., 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wilayah yang berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora melalui metode deliniasi pusat perkotaan menggunakan klasifikasi desa perkotaan dan pedesaan dari BPS yang kemudian *overlay* dengan *GHSL*, penentuan hierarki pusat pelayanan melalui analisis skalogram, analisis interaksi melalui analisis model

gravitasi, dan perumusan arah pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan pengembangan pusat pertumbuhan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan wilayah di Kabupaten Blora.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kabupaten Blora merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 kontribusi PDRB Kabupaten Blora hanya sebesar 1,87% terhadap total PDRB Jawa Tengah. Nilai rasio gini Kabupaten Blora pada tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 0,354 (yang tertera pada **gambar 1.1**), yang artinya pendapatan Kabupaten Blora memiliki tingkat ketimpangan sedang. Selain itu, dilihat dari kondisi infrastruktur jalan tiap kecamatan di Kabupaten Blora, banyak yang memiliki persentase jalan dengan kondisi rusak berat seperti pada Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Kradenan, dan Kecamatan Banjarejo. Hal ini menunjukkan pembangunan wilayah di Kabupaten Blora masih mengalami ketidakmerataan di antar kecatamannya. Diperlukan arahan pengembangan pada pusat pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Blora.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penulisan ini adalah untuk merumuskan arah pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

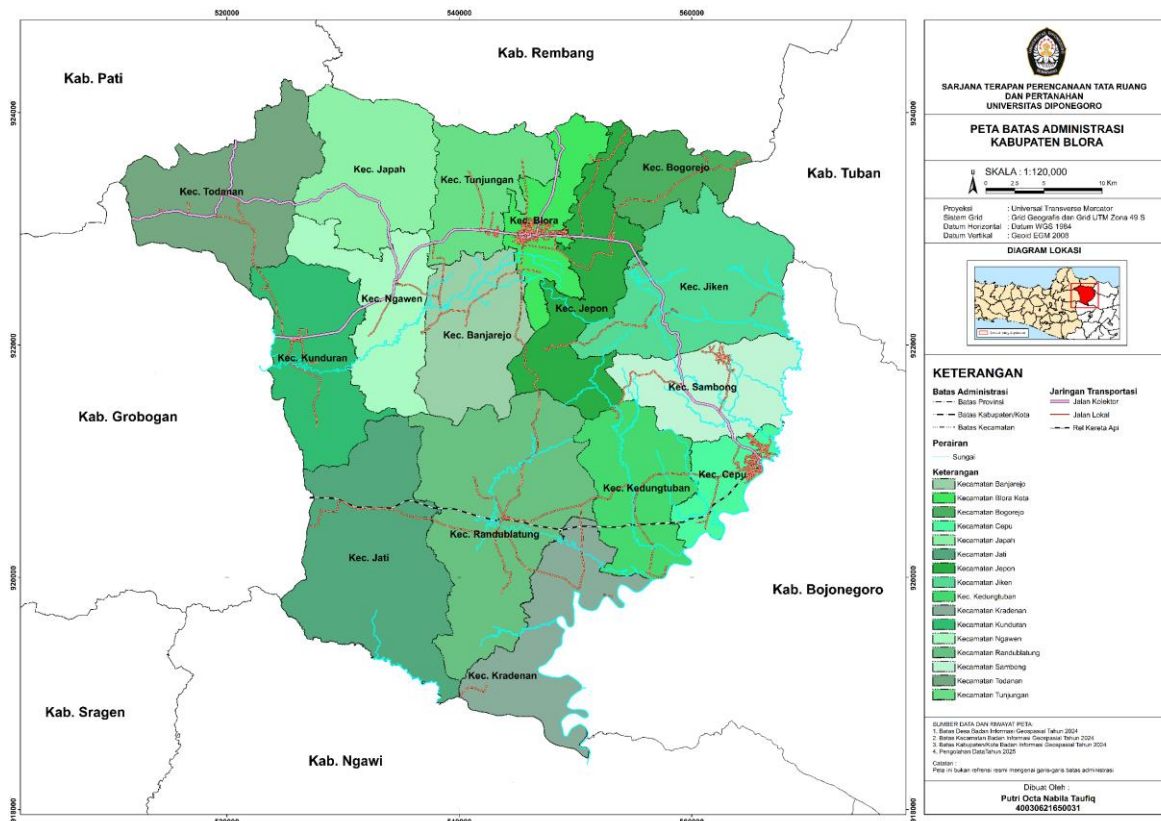
1. Analisis Deliniasi Kawasan Perkotaan di Kabupaten Blora
2. Analisis Hierarki Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora
3. Analisis Nilai Interaksi Antar Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora
4. Analisis Kajian Kebijakan Perencanaan di Kabupaten Blora
5. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup atas 2 yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah membahas terkait dengan batasan wilayah yang dikaji, alasan pemilihan lokasi dan gambaran singkat termasuk menampilkan dalam bentuk peta. Ruang lingkup materi berisi materi yang akan dikaji serta hal yang membatasi substansi yang dikaji.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dilakukan untuk membatasi wilayah penelitian. Adapun ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Kabupaten Blora, sebagai unit analisis untuk melihat pertumbuhan perekonomian dan penentuan pusat pelayanan.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1. 4 Peta Batas Administrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora terletak antara garis $6^{\circ}528'$ - $7^{\circ}248'$ Lintang Selatan dan garis $111^{\circ}16'$ - $111^{\circ}338'$ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Blora terbagi atas 16 wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat 24 kelurahan dan 271 desa yang memiliki luas 1.820,59 Km². Kabupaten Blora memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Terdapat beberapa analisis yang digunakan untuk menentukan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora:

1. Analisis Deliniasi Pusat Perkotaan

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang termasuk ke dalam desa perkotaan dan perkotaan di Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia dan menggunakan data GHSL (*Global Human Settlement Layer*) tahun 2020. Data spasial

GHSL ini menunjukkan distribusi dan kepadatan populasi, yang dinyatakan sebagai jumlah orang per sel dengan resolusi spasial 250 meter (Sari & Tambunan, 2022).

2. Penentuan Hierarki Pusat Pertumbuhan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hierarki-hierarki dari pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora menggunakan metode Skalogram.

3. Analisis Interaksi

Analisis ini digunakan untuk melihat daya tarik suatu potensi di suatu wilayah serta digunakan untuk mengetahui interaksi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterlandnya* menggunakan metode analisis gravitasi (Abidin, 2011).

4. Analisis Kebijakan

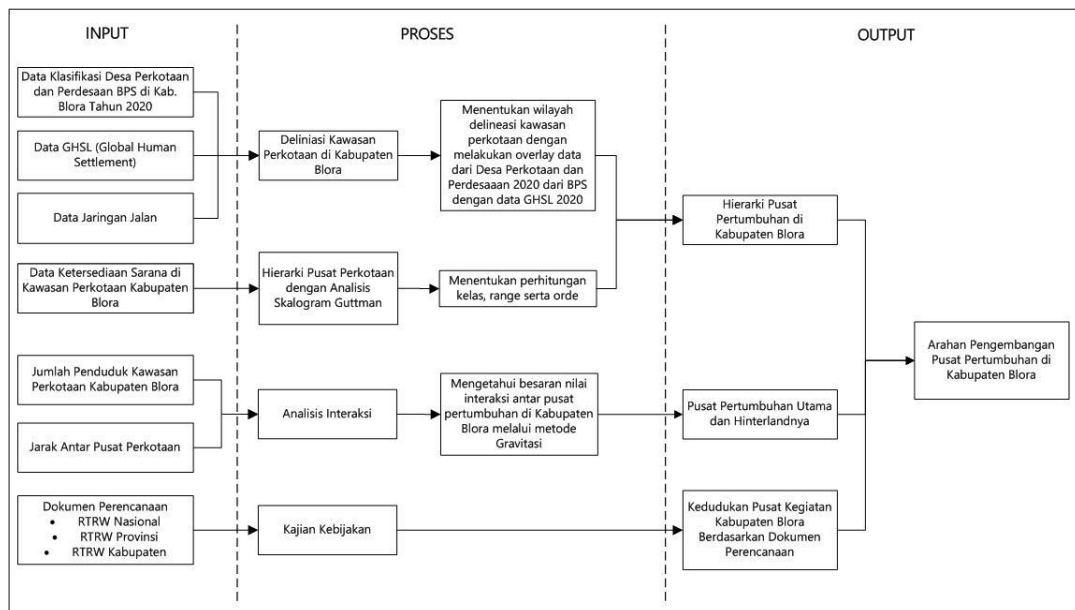
Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan publik (Simatupang, 2003).

5. Arahan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Arah pengembangan pusat pertumbuhan ditentukan berdasarkan hasil dari analisis deliniasi pusat perkotaan, penentuan hierarki pusat pertumbuhan, analisis interaksi antar pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitarnya, serta melihat fasilitas dan jenis penggunaan lahan yang ada pada wilayah tersebut.

1.5 Tahapan/Proses

Kegiatan penelitian tugas akhir yang dilakukan memiliki tahapan pelaksanaan penelitian meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga menghasilkan *output* berupa arahan pengembangan kawasan pertumbuhan di Kabupaten Blora.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 1. 5 Kerangka Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora

A. Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap lokasi penelitian yaitu menyusun gambaran awal mengenai wilayah studi dalam penelitian yang diperlukan melalui berbagai literatur, buku, artikel, peraturan pemerintah, dan dokumen kebijakan lainnya lalu menyusun perumusan masalah sesuai dengan fenomena yang ada di wilayah studi.

B. Input/Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data mencakup data yang diperlukan dalam melakukan analisis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode sekunder. Data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen studi kepustakaan dan permohonan data pada instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

C. Proses/Analisis

Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis spasial pada deliniasi kawasan perkotaan di Kabupaten Blora. Selain itu terdapat analisis kuantitatif untuk menentukan hierarki kawasan dengan menggunakan alat bantu skalogram, serta untuk menghitung besaran nilai interaksi antara pusat pertumbuhan dengan *hinterlandnya*.

D. Output

Tahap akhir pada penelitian ini menghasilkan output berupa arahan pengembangan dari pusat – pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora serta peta arahan pengembangan pusat pertumbuhan Kabupaten Blora sebagai hasil yang selanjutnya akan di HKI kan.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian yang akan digunakan pada tahap analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni dengan telaah dokumen dan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari instansi-instansi terkait. Teknik pengumpulan data survei sekunder adalah metode untuk mengumpulkan data atau informasi secara tidak langsung. Survei sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah permohonan data dan telaah dokumen. Permohonan data dilakukan kepada instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4). Pada telaah dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis yang dapat diakses secara *online* pada *website*.

Tabel 1. 1 Tabel Kebutuhan Data

Sasaran	Nama Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tahun
Analisis Deliniasi Kawasan Perkotaan	Data Klasifikasi Desa Kota	Sekunder	Telaah Dokumen	BPS	2020
	Data Jaringan Jalan	Sekunder	Permohonan Data	DPUPR	2025
	Data GHSL	Sekunder	Telaah Dokumen	Geo Copernicus	2020
Analisis Hierarki Pusat Pertumbuhan	Data Ketersediaan Sarana	Sekunder	Permohonan Data	DPUPR	2025
Analisis Interaksi	Data Jumlah Penduduk	Sekunder	Telaah Dokumen	BPS	2024
	Jarak antar kecamatan	Sekunder	Permohonan Data	DPUPR	2025
Arahan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Hasil Produksi Pertanian	Sekunder	Permohonan Data	DP4	2024
	Hasil Produksi Perkebunan	Sekunder	Permohonan Data	DP4	2024
	Hasil Produksi Kehutanan	Sekunder	Permohonan Data	DP4	2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif yang kemudian akan diinterpretasikan. Berikut merupakan penjabaran analisis yang digunakan.

1. Analisis Deliniasi Kawasan Perkotaan

- 1) Mengidentifikasi desa/kelurahan yang termasuk ke dalam perdesaan, desa perkotaan, dan perkotaan berdasarkan data BPS Klasifikasi Perdesaan Perkotaan di Indonesia tahun 2020
- 2) Mengidentifikasi kawasan perkotaan berdasarkan data *GHSL* tahun 2020
- 3) Melakukan *overlay* data klasifikasi desa kota BPS tahun 2020 dengan data *GHSL* tahun 2020

2. Penentuan Hierarki Kawasan Pertumbuhan

Penentuan hierarki kawasan pertumbuhan ini menggunakan metode skalogram. Analisis skalogram dilakukan dengan menuliskan ada atau tidaknya fasilitas (fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan) di suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 jika fasilitas tersebut ada dan mengisikan angka 0 jika fasilitas tersebut tidak ada di suatu wilayah. Tahapan dalam analisis skalogram meliputi:

- 1) Menyusun wilayah yang termasuk dalam deliniasi kawasan perkotaan Kabupaten Blora dari hasil analisis sebelumnya

- 2) Mengidentifikasi jenis fasilitas yang tersedia di kabupaten/kota
- 3) Memberi tanda/angka (1) pada sel yang memiliki fasilitas, dan tanda /angka (0) pada sel tidak memiliki fasilitas
- 4) Jumlahkan dan susun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas dari yang terbanyak ke sampai yang paling sedikit
- 5) Menentukan total eror
- 6) Melakukan pengujian kelayakan koefisien dengan menggunakan rumus *Coefficient of Reproducibility* (COR) sebagai berikut:

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Keterangan :

e : Jumlah eror

N : Jumlah subjek/daerah, serta

K : Jumlah obyek/fasilitas

- 7) Menentukan jumlah kelas K:

$$K = 1 + (3,3 \times \log n)$$

- 8) Melakukan perhitungan panjang interval kelas

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{K}$$

I adalah panjang *interval* kelas dan K adalah jumlah kelas untuk masing masing wilayah.

- 9) Langkah terakhir adalah menentukan hirarki/orde perkotaan yang terbentuk

3. Analisis Interaksi

Analisis interaksi dilakukan dengan menggunakan metode analisis gravitasi. Teori dari model gravitasi ini berpendapat bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam memiliki daya tarik yang mempengaruhi antar dua wilayah. Analisis gravitasi ini dapat membantu memperkirakan daya tarik yang dimiliki suatu wilayah dibanding dengan wilayah lain di sekitarnya (Fasa & Revayanti, 2021).

Analisis Gravitasi menggunakan beberapa variabel, yakni jumlah penduduk (jiwa); dan jarak antar wilayah. Penelitian menggunakan model gravitasi untuk mencari tahu bagaimana interaksi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterlandnya*. Untuk melihat besaran nilai interaksi antara pusat pertumbuhan terhadap *hinterlandnya* dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut:

$$A_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan:

- A_{ij} : Nilai interaksi antara wilayah i dengan wilayah j
- k : Konstanta empiris dengan nilai sebesar 1
- P_i : Jumlah penduduk di wilayah i, dinyatakan dengan satuan ribu jiwa
- P_j : Jumlah penduduk di wilayah j, dinyatakan dengan satuan ribu jiwa
- d_{ij} : Jarak antara wilayah i dan wilayah j, dinyatakan dengan satuan km
- b : Bilangan pangkat d_{ij} , nilai yang sering digunakan adalah $b=2$

4. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu proses sintesis informasi, yakni mengintegrasikan berbagai dokumen kebijakan untuk menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Aktivitas utamanya adalah pengumpulan informasi secara terstruktur dan penarikan kesimpulan yang rasional. Dokumen kebijakan yang digunakan yakni adalah dokumen mengenai tata ruang atau yang biasa disebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari level pemerintah pusat sampai ke level pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Blora. RTRW Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang (Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam RTRW diatur pembagian wilayah menurut fungsi, misalnya kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan permukiman, kawasan perkotaan, hingga kawasan metropolitan.

5. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Arah pengembangan pusat pertumbuhan ditentukan berdasarkan hasil dari analisis pusat perkotaan, penentuan hierarki pusat pertumbuhan, potensial ekonomi wilayah tersebut (yang dapat dilihat melalui penggunaan lahan eksisting), dan analisis interaksi antar pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitarnya. Kawasan yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi lebih tinggi akan menjadi kawasan yang dituju dari arah pengembangan pusat pertumbuhannya. Penentuan arah pengembangan pusat pertumbuhan ini juga mempertimbangkan dari kajian kebijakan dokumen tata ruang yang mengatur di wilayah tersebut.